

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era informasi, masalah transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Salah satu prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang banyak menjadi perhatian publik adalah masalah keterbukaan dan pengungkapan (*transparency and disclosure*). Pada saat ini, publik memerlukan keterbukaan informasi, terutama bagi perusahaan yang sudah *go public*. Para pemegang saham dan *stakeholder* lain memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang, dan kontinyu. Pengungkapan informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang, artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif, terutama yang terkait dengan aspek manajemen resiko.

Oleh karena itu, saat ini publik lebih menuntut perusahaan untuk mengungkapkan segala informasi yang dimiliki secara lebih terbuka dan bertanggung jawab. Sebab, segala informasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang diambil oleh para *stakeholder*. Dengan demikian, diharapkan pemenuhan terhadap prinsip GCG ini dapat meminimalisir timbulnya informasi yang keliru (*disinformasi*) serta informasi yang disembunyikan oleh perusahaan yang akan berakibat kepada pihak lain, baik pemegang saham maupun *stakeholders* lainnya.

Dengan meningkatnya kebutuhan publik terhadap perusahaan, maka tentunya pengungkapan informasi yang transparans dan akuntabel menjadi salah satu acuan perusahaan dalam mewujudkan implementasi GCG. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan suatu peraturan mengenai praktik GCG yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor : Kep-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan Surat Keputusan No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN (Ir. I Made Mandra, MSc, 2005). Ketentuan peraturan diatas dimaksudkan untuk memberikan pegangan yang lebih rinci bagi BUMN dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan pada perusahaan masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, serta kewajaran.

Sebenarnya, pengungkapan CG tidak hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik yang kian meningkat, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan daya saing perusahaan di mata masyarakat. Hal ini bisa terjadi sebab GCG secara tidak langsung dapat membantu perusahaan dalam mengelola asset dan transaksi secara efektif dan efisien, serta pemenuhan terhadap prinsip GCG bisa membuat pengungkapan informasi menjadi lebih jelas dan terbuka sehingga dapat mengurangi tingkat keraguan masyarakat terhadap perusahaan. Hal-hal yang menyangkut masalah reputasi, keunggulan kompetitif serta profesionalisme telah mendorong kebanyakan perusahaan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang bersih dan terpercaya.

Hal ini dibenarkan oleh anggota panel ahli *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), Mas Ahmad Daniri (2002) dalam Djatmiko (2002), bahwa “Esensi dari GCG secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitas maupun pertumbuhannya. Dampak penerapan GCG, selain bisa menghilangkan KKN dan menciptakan serta mempercepat iklim berusaha yang lebih sehat, juga meningkatkan kepercayaan baik investor maupun kreditor. Di sanalah kaitan antara penerapan GCG dan kinerja perusahaan”.

Selain itu, bagi perusahaan yang ingin melakukan pembenahan diri, maka implementasi CG akan menjadi sangat berguna. Sebab, selain pemenuhan prinsip GCG sendiri dapat membantu perusahaan untuk mengelola asset dan keuangannya, GCG juga dapat menjadi pilihan untuk memperbaiki kredibilitas dan meningkatkan citra perusahaan di mata investor dan masyarakat. Shleifer dan Vishny (1997) dalam Daniri (2004), menjelaskan bahwa GCG sebagai bagian dari cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan.

Saat ini, salah satu implementasi CG yang banyak dibicarakan oleh banyak pihak adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adanya kesadaran masyarakat akan penerapan CSR disebabkan karena semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Menurut *World Business Council on Sustainability Development* (2007) dalam Wibisono (2007), CSR merupakan suatu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen dari perusahaan ini termasuk ke dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Keselarasan diantara perusahaan dan para *stakeholders*-nya ini dapat terpenuhi apabila terdapat komitmen penuh dari manajemen puncak perusahaan terhadap penerapan CSR.

Berdasarkan pandangan dari penelitian CSR sebelumnya, banyak praktisi yang mengatakan bahwa kerangka akuntansi finansial masih terlalu sempit (Guthrie & Parker, 1993) dalam Finch (2005). Hal ini menyebabkan informasi yang diungkapkan perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan banyak pihak yang tidak hanya memerlukan informasi mengenai laba perusahaan saja tetapi juga tanggung jawab sosial serta interaksinya terhadap lingkungan dan komunitas lokal. Konsep mengenai pendapatan juga dipandang masih perlu diperluas (Bedford, 1965) dalam Finch (2005) karena performa ekonomi tidak menjadi patokan bagi total kesejahteraan perusahaan (Bedford, 1965; Pigor, 1938) dalam Finch (2005). Selain itu, perusahaan juga harus mampu mempertemukan antara laba usaha dengan kontribusi terhadap kualitas hidup secara umum sebab aktifitas bisnis perusahaan akan berdampak pada aspek ekonomi dan aspek sosial (Estes, 1976) dalam Finch (2005).

Deegan (1999) dalam Finch (2005) mengatakan bahwa, “.. *for an organisation or community to be sustainable (a long-run perspective), it must be financially secured (as evidenced through such measures as profitability), it must minimise (or ideally eliminate) its negative environmental impact, and it must act in conformity with society’s expectations*”. Mengacu pada kutipan diatas, maka saat ini perusahaan ditantang untuk dapat memenuhi suatu pandangan baru yang disebut dengan “*Growth and Sustainability Company*” dimana pencapaian perusahaan tidak hanya diukur dari perolehan laba saja, tetapi juga dari tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, baik terhadap komunitas lokal, masyarakat luas, maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu, timbul suatu pendekatan baru yang dikenal dengan nama *triple bottom line model*, yang terdiri dari aspek *profit*, *people*, dan *planet* (3P). Sebuah laporan keuangan yang menggunakan *triple bottom line model*, tidak hanya melaporkan aspek keuangan

perusahaan saja tetapi juga melaporkan aspek kepedulian sosial dan usaha pelestarian lingkungan hidup.

Berbagai penelitian mengenai Pengungkapan CG dan CSR telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinants of Corporate Ownership and Board Structure : Evidence in Singapore* , meneliti pengaruh dari *corporate ownership* dan *board structure* terhadap *voluntary disclosure*. Berdasarkan 158 sampel perusahaan yang tercatat di Singapore, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat *managerial ownership* yang rendah dan *government ownership* yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk lebih mengungkapkan *corporate disclosure*. Sedangkan, adanya peningkatan terhadap keberadaan *independent directors* akan menurunkan tingkat *corporate disclosure*.

Gao et al (2005) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinants of Corporate Social and Enviromental Reporting in Hong Kong: a Research Note* ingin mengetahui pola *Corporate Social Enviromental Disclosure* (CSED) pada perusahaan yang *listed* di Hong Kong melalui 154 laporan tahunan dari 33 perusahaan dari tahun 1993 sampai 1997. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen seperti ukuran perusahaan, tipe industri, lokasi, dan *content themes*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dengan tingkat CSED, serta perusahaan utilitas lebih mengungkapkan CSED bila dibandingkan dengan perusahaan properti atau pun perbankan. Penelitian Gao et al (2005) ini akan digunakan sebagai acuan dalam pengukuran pengungkapan CSR yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Hackston dan Milne (1996) dalam penelitiannya yang berjudul *Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies*, telah meneliti faktor-faktor

yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial melalui ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, serta *country ownership*. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dan tipe industri akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan, sedangkan profitabilitas tidak. Lalu, tingkat pengungkapan juga lebih diungkapkan oleh perusahaan yang termasuk ke dalam industri *high profile* dari pada industri *low profile*. Roberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) mendefinisikan industri *high profile* sebagai industri yang mempunyai visibilitas konsumen, resiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang ketat. Anggraini (2006) mengelompokkan industri pertambangan, pertanian, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, serta farmasi sebagai industri *high profile*. Sedangkan, Roberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) mengelompokkan produk kesehatan, hotel, produk rumah tangga sebagai industri *low profile*.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirfazli dan Nurdiono (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan dalam Kelompok Aneka Industri yang *Go Public* di BEJ, dimana hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan 16 perusahaan sampel terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penyajian jumlah pengungkapan sosial antara perusahaan dalam kelompok aneka industri *high profile* dengan perusahaan dalam kelompok aneka industri *low profile*. Pengelompokan industri *high profile* dalam penelitian Mirfazli dan Nurdiono (2007) tidak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Roberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) tapi sama-sama menggunakan otomotif (aneka industri) dalam pengklasifikasian industri *high profile*.

Berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri lebih menyoroti masalah CG yang diwakilkan melalui proksi tertentu, sedangkan tidak banyak

diantara mereka yang menyoroiti masalah Pengungkapan CG serta hubungannya dengan Pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Hal ini tentunya menarik untuk diteliti, mengingat selain tengah menjadi isu hangat di kalangan para praktisi, akademisi, bahkan masyarakat umum, CSR juga merupakan proksi munculnya GG. Logisnya Pengungkapan CG dan CSR dalam suatu perusahaan akan mempunyai hubungan yang positif dan saling berpengaruh satu sama lain. Sebab, seharusnya dengan Pengungkapan CG yang tepat dan konsisten akan mendorong perusahaan untuk melakukan Pengungkapan CSR yang optimal dan berkelanjutan, begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, penulis ingin mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti pola hubungan yang terjadi diantara Pengungkapan *Corporate Governance* (CG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam industri *high profile* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pertimbangan untuk membatasi penelitian hanya pada industri *high profile* didasari oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Roberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) dimana ia mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara industri *high profile* dengan pengungkapan informasi sosial perusahaan. Jadi, diharapkan dengan adanya pembatasan ini dapat menjaga signifikansi serta keandalan hasil penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat belum banyaknya penelitian yang mengangkat masalah serupa serta pertimbangan akan adanya hubungan diantara CG dan CSR dalam suatu perusahaan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola hubungan yang terjadi diantara Pengungkapan *Corporate Governance* (Kusumawati, 2006) dengan Pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility (Gao et al, 2005) pada perusahaan yang termasuk ke dalam industri *high profile* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penilaian Pengungkapan CG akan menggunakan model KNKCG, sebab acuannya lebih dapat diterapkan pada penelitian di Indonesia jika dibandingkan dengan acuan lain yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Selain itu, ukuran pengungkapan CSR juga akan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Gao et al (2005) sebab selain standar yang ditetapkan organisasi internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) masih terlalu tinggi, penelitian Gao et al (2005), juga menyediakan *content themes* yang bisa digunakan sebagai acuan pengungkapan informasi sosial yang tidak banyak ditemukan pada penelitian lainnya.

Pengungkapan *Corporate Governance* akan dilihat berdasarkan *Code of Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (Kusumawati, 2006) pada tahun 2001 dimana terdiri dari 43 butir pedoman mengenai mekanisme CG yang akan diimplementasikan pada 6 industri *high profile* dengan total 53 perusahaan sampel yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan dilihat berdasarkan *Corporate Social and Enviromental Disclosure* (Gao et al, 2005) dimana berisikan 6 tema yang terkait dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam suatu perusahaan. Selain itu, pola hubungan diatas juga dilihat dengan menggunakan indikator finansial serta ukuran perusahaan sebagai variabel pengendali untuk menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan tersebut.

1.3 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pola hubungan yang terjadi diantara Pengungkapan CG dan CSR di dalam suatu perusahaan. Maka, pengungkapan akan diukur

melalui *content analysis* atas laporan tahunan perusahaan sample. *Content analysis* merupakan metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat pendugaan atas suatu teks. Teks yang ada kemudian digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kriteria tertentu (Hendrasaputra, 2007). Dengan demikian, objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pola hubungan Pengungkapan *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada suatu perusahaan.
- 2) Untuk mendapatkan bukti mengenai pengaruh indikator finansial terhadap besarnya Pengungkapan *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dalam suatu perusahaan.
- 3) Untuk mendapatkan bukti mengenai pengaruh variabel pengendali terhadap besarnya Pengungkapan *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dalam suatu perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi berupa bukti empiris mengenai pola hubungan Pengungkapan *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam suatu perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan ataupun referensi kepada perusahaan untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Menggunakan jurnal-jurnal dan atikel yang terkait guna memperoleh gambaran umum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan model statistik.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terkait, yang didapatkan dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEI, internet, serta publikasi lainnya.

3. Pengujian Hipotesis

Setelah pengumpulan data-data yang dibutuhkan, maka penulis menguji hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS.

1.6.2 Model Penelitian

a). **Pengungkapan CG** = $\int \alpha + \beta_1 \text{Pengungkapan CSR} + \beta_2 \text{Resiko} + \beta_3 \text{Profitabilitas} + \beta_4 \text{Ukuran Perusahaan} + \beta_5 \text{Komisaris Independen} + \beta_6 \text{Kepemilikan Manajemen}$

b). **Pengungkapan CSR** = $\int \alpha + \beta_1 \text{Pengungkapan CG} + \beta_2 \text{Resiko} + \beta_3 \text{Profitabilitas} + \beta_4 \text{Ukuran Perusahaan} + \beta_5 \text{Status Afiliasi} + \beta_6 \text{Komisaris Independen} + \beta_7 \text{Kepemilikan Manajemen}$

Untuk mengukur variabel dependen dan independen diatas, maka penulis akan menggunakan sejumlah indikator berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu :

1. Pengungkapan CSR

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Gao et al, (2005), maka pengukuran *CSR Disclosure* akan menggunakan *Corporate Social and Enviromental Disclosure* yang berisikan 6 tema yang terkait dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, yaitu *environment, energy, health and safety, human resources, community involvement* dan *fair business practices*.

2. Pengungkapan CG

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2006), maka pengukuran pengungkapan CG akan menggunakan *Code of Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) dimana merupakan pemenuhan dari 43 butir pedoman mengenai mekanisme GCG dalam suatu perusahaan.

3. Kepemilikan Manajemen

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006), maka pengukuran struktur kepemilikan akan menggunakan kepemilikan manajemen dimana merupakan proporsi saham atas dewan direksi dan dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

4. Resiko

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006), maka pengukuran *leverage* akan menggunakan *debt to equity ratio* (utang/ekuitas).

5. Profitabilitas

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Labelle (2002), maka pengukuran *profitability* akan menggunakan ROE (*Return on Equity*).

6. Ukuran Perusahaan

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Labelle (2002), maka pengukuran *size* akan menggunakan logaritma atas total aktiva perusahaan karena dianggap relative stabil jika dibandingkan indikator lainnya (mis: penjualan).

7. Status Afiliasi

Pengukuran status afiliasi akan menggunakan variabel dummy, dimana status ini akan menggambarkan apakah perusahaan tersebut mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan asing atau tidak. (Pemberian bobot 1, jika perusahaan tersebut memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asing)

8. Komisaris Independen

Mengacu pada penelitian Labelle (2002), maka pengukuran komisaris independen akan menggunakan proporsi dimana merupakan pembagian antara jumlah komisaris independen dengan keseluruhan direksi serta komisaris yang berada di dalam perusahaan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan data sekunder, yaitu *Code of Good Corporate Governance*, *Corporate Social and Enviromental Disclosure*, laporan keuangan dan laporan perusahaan-perusahaan terkait, yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEJ, internet dan publikasi lainnya.

1.6.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini hanya dibatasi kepada perusahaan yang termasuk ke dalam industri *high profile*. Hal ini dilakukan karena berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yang salah satunya dilakukan oleh Patten (1991) dan Roberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perusahaan yang termasuk ke dalam industri *high profile* dengan jumlah informasi sosial yang diungkapkan. Oleh karena itu, penulis ingin membatasi penelitian ini hanya kepada perusahaan yang masuk ke dalam industri *high profile* untuk menjaga keandalannya. Sedangkan, untuk masalah klasifikasi industri penulis mengacu pada beberapa penelitian yang tercantum di dalam Hackston dan Milne (1996) yaitu Industri Pertambangan (Dierkes dan Preston, 1977), Pertanian (Kelly, 1981), Barang Konsumsi (Cowen et al, 1987), Dasar dan Kimia (Patten, 1991), Aneka Industri (Roberts, 1992) serta Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi (Roberts, 1992).

Dengan demikian, sampel dari penelitian ini adalah 53 perusahaan yang termasuk ke dalam industri *high profile* dengan rincian 8 perusahaan dari Industri Pertambangan, 3 perusahaan dari Industri Pertanian, 11 perusahaan dari Industri Barang Konsumsi, 9 perusahaan dari Industri Dasar dan Kimia, 5 perusahaan dari Aneka Industri, serta 17 perusahaan dari Industri Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006.

1.6.5 Metode Pengujian Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, maka analisis dan pengolahan data pun dimulai. Untuk mengetahui pola hubungan yang terjadi pada Pengungkapan *Corporate*

Governance dan *Corporate Social Responsibility* atas sampel yang telah disebutkan sebelumnya, penulis menggunakan metode Regresi Linear Berganda.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I, yakni bab pertama yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, serta uraian singkat mengenai metodologi penelitian dan sistematika penulisan .

Bab II, mencakup landasan teoritis mengenai konsep dan penjabaran *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* secara umum, serta penelitian – penelitian terdahulu mengenai pola hubungan *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.

Bab III, merupakan metodologi penelitian yang memaparkan metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan data, variabel-variabel penelitian, hipotesis penelitian, serta metode pengujian yang akan digunakan.

Bab IV, menyajikan hasil pengujian statistik dan analisisnya. Sehingga diperoleh hasil penelitian sebagai jawaban atas tujuan penelitian.

Bab V, merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kelemahan dari penelitian dan saran-saran bagi penelitian-penelitian mendatang.